

SINERGI PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

THE SYNERGY BETWEEN THE VILLAGE GOVERNMENT AND THE COMMUNITY'S ROLE IN DEVELOPING A TOURISM VILLAGE TO INCREASE COMMUNITY WELFARE

Muhammad Mujtaba Habibi*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 28 Februari 2022
Disetujui : 17 Juni 2022

Keywords:

village government, community, tourism, village development, public welfare

Kata Kunci:

pemerintah desa, masyarakat, pengembangan desa, wisata, kesejahteraan

***) Korespondensi:**

E-mail: m.muhtaba.fis@um.ac.id

Abstract: this study aimed to describe the tourism village development program, the synergy of the village government and the community's role in the development of tourist villages, as well as improving community welfare through the development of tourist villages in Semen Village, Blitar Regency. This study used a qualitative approach with the type of descriptive research—sources of data in the form of primary data and secondary data. Data were collected by using observation, interview and documentation techniques. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman. The study results showed that the tourism village development program included physical development in the form of facilities and infrastructure and non-physical development in the form of community empowerment. The synergy of the village government influences the success of developing a tourist village through potential exploration and the community as coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. Furthermore, developing tourist villages could improve community welfare, including income, clean settlements, education levels, and the fulfilment of health facilities.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pengembangan desa wisata, sinergi peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Semen Kabupaten Blitar. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pengembangan desa wisata meliputi pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh sinergi pemerintah desa melalui eksplorasi potensi dan masyarakat sebagai koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi penghasilan, pemukiman yang bersih, tingkat pendidikan, serta terpenuhinya fasilitas kesehatan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kedaulatan melaksanakan pemerintahan untuk pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mulai dari pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai langkah pemerintah desa dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan. UU Desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum disahkannya UU Desa bersifat *top down* sehingga desa sebagai objek penerima kebijakan baik dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sistem pembangunan seharusnya bersifat *bottom up* dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan (Endah, 2020). Pembangunan didasarkan pada hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (Sukriono, 2021). Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan pemberian solusi dalam pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi desa.

Penetapan UU Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola wilayahnya bersama-sama dengan masyarakat. Desa tidak dianggap sebagai pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah di atasnya, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemerintah desa dengan kewenangan otonominya tidak dapat meminta bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Otonomi menuntut kemandirian desa di berbagai bidang termasuk dalam mendanai dan pelaksanaan pembangunan (Habibi, 2015). Pelaksanaan pembangunan yang baik harus dimulai

dari desa sebagai penopang perekonomian di tingkat daerah maupun nasional. Desa memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat.

Upaya yang dilakukan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu pengembangan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok agar bermanfaat serta memiliki kemampuan merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi (Endah, 2020). Pemberdayaan merupakan strategi pemerintah desa dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan baik infrastruktur dan suprastruktur harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Mukmin, Ruslan, & Kurniati, 2018). Kebijakan pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Kondisi masyarakat desa saat ini telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya peningkatan harkat serta martabat diperlukan agar masyarakat desa dapat bermanfaat dan mandiri. Sinergi antara peran pemerintah desa dengan masyarakat diperlukan agar pengembangan desa wisata berjalan dengan baik (Mahardika & Utama, 2020). Pemerintah desa memunculkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan (Syarifudin & Ma'ruf, 2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata merupakan upaya pemerintah desa dalam mendorong warganya untuk berperan aktif dalam setiap proses kegiatan.

Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pembentukan CBT yaitu ada ketidaksinkronan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait pengembangan desa wisata. Masyarakat hanya sebagai pelaku wisata yang pasif karena tidak dilibatkan oleh pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa wisata. Pemerintah desa

seharusnya tidak menjadi satu-satunya aktor dalam proses pengembangan desa wisata (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017). Masyarakat yang pasif dan tidak peduli dengan potensi desanya dikarenakan pengembangan desa wisata tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata seharusnya berkolaborasi atau bersinergi dengan masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan.

Permasalahan dalam pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan desa wisata meliputi pemahaman masyarakat yang kurang, tidak adanya lembaga pengelola, kurangnya sumber daya manusia, serta belum adanya pemetaan produk unggulan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan desa wisata meliputi adanya kajian desa wisata, dukungan pemerintah kabupaten atau provinsi, belum adanya pemberdayaan masyarakat, serta masalah pemasaran (Putra, 2020). Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata mengalami kendala karena belum adanya kepedulian masyarakat, potensi wisata tidak dikelola secara optimal, dan manajemen desa wisata tidak berjalan dengan baik (Admaja, Oktiva, & Suwarjo, 2020). Permasalahan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata menjadi problematika dalam pembangunan.

Potensi desa yang diperoleh dari hasil penunjukkan pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah desa dan masyarakat yang belum menyadari potensi desanya mengakibatkan penunjukan desa wisata oleh pemerintah pusat dan daerah hanya terkesan seremoni dan tidak berjalan. Pengembangan desa wisata dari hasil penunjukkan oleh pemerintah menghambat kreativitas masyarakat (Masitah, 2019). Permasalahan pengembangan desa wisata yang dipelopori oleh pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan menjadi payung hukum dalam pengembangan desa wisata, sedangkan masyarakat sebagai pelaku yang dituntut kreatif agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa desa wisata yang berkembang

sampai pada Tahun 2018 sebanyak 1.734. Pertumbuhan desa wisata di Indonesia yang sangat masif dikarenakan setiap desa berlomba-lomba mengembangkan potensinya masing-masing (Putra, 2020). Desa wisata akan terus berkembang seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan dalam pengembangan desa wisata jika tidak diatasi dengan baik akan menjadi data dan angka saja tanpa memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan desa wisata yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Keberhasilan pengembangan desa wisata di Desa Semen dipengaruhi adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata (Dewi, 2013). Pengembangan desa wisata tidak dapat berjalan optimal dengan melibatkan peran satu pihak saja. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) program pengembangan desa wisata, (2) sinergi peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta (3) tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dalam kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Jenis penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan fakta secara lengkap sesuai dengan keadaan atau kondisinya. Sumber data dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara relatif untuk mempertahankan keseluruhan objek agar terintegrasi. Kajian ini dilakukan pada Kampung Wisata Ekologis (KWE) Puspa Jagad di Desa Semen, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki. Pengembangan desa wisata perlu didukung adanya atraksi, jarak dan lokasi, besaran desa, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, serta ketersediaan infrastruktur (Sugiarti, Aliyah, & Yudana 2016). Desa wisata harus memiliki atraksi yang menarik dan berbeda dengan daerah lainnya. Lokasi desa wisata harus dipertimbangkan jarak tempuhnya dari tempat tinggal wisatawan, ibukota provinsi dan kabupaten, bandara, pelabuhan, dan terminal. Besaran desa wisata menjadi daya dukung kepariwisataan meliputi jumlah rumah dan penduduk, serta luas wilayah. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan menjadi aspek penting mengingat adanya agama mayoritas dan aturan-aturan komunitas desa wisata. Desa wisata harus memiliki infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, drainase, telepon, dan fasilitas lainnya. Pengembangan desa wisata harus memenuhi unsur lokalitas desa untuk menarik wisatawan.

Penghargaan desa wisata maju dan terbaik di Indonesia diberikan kepada Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Desa Semen berada dalam kawasan wisata Gunung Kelud sisi selatan yang ada di Kabupaten Blitar. Desa Semen memiliki kurang lebih 1.079 Ha yang terdiri dari Dusun Semen, Dusun Tegalrejo, Dusun Dewi, dan Dusun Parang. Upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat maka keempat dusun terbagi menjadi 14 Rukun Warga (RW) dan 57 Rukun Tetangga (RT). Desa Semen memiliki banyak potensi alam untuk dikembangkan. Wisata alam yang dikembangkan di Desa Semen diberi nama Kawasan Wisata Ekologis (KWE) Puspa Jagad. Masyarakat memelopori pengembangan KWE Puspa Jagad dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Proses pengembangan desa wisata di Desa Semen berbeda dengan beberapa daerah lainnya. Pengembangan desa wisata di Desa Semen dikategorikan unik karena tidak berasal dari penunjukkan pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan desa wisata di Desa Semen berawal dari inisiatif masyarakat khususnya para pemuda yang tergabung dalam kelompok "Puspa Jagad". Faktor pendukung untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata meliputi kesadaran, kemampuan, dan kesempatan (Frasawi & Citra, 2018). Kesadaran menjadi faktor utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan desa yang memanfaatkan potensi atau sumber daya alamnya (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Kawasan Wisata Ekologi (KWE) Puspa Jagad di Desa Semen dikembangkan karena adanya gerakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terkait potensi daerahnya.

Puspa Jagad Desa Semen tidak hanya mengembangkan desa wisata tetapi juga pelestarian alam. Upaya pelestarian alam sebagai penunjang dalam memperindah kawasan wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Potensi alam Desa Semen pada dasarnya tidak lebih baik dari desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar. Keunggulan dari Desa Semen yaitu mampu bersaing dan menjadi primadona di Kabupaten Blitar karena dalam pengembangan desa wisatanya melestarikan potensi alam yang ada. Pembangunan desa wisata harus memperhatikan semua aspek atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekosistem sehingga dapat diterima dan tidak merusak sistem sosial dan budaya masyarakat setempat (Masitah, 2019). Pengembangan desa wisata dapat dilakukan tanpa harus merusak alam yang ada di Desa Semen.

Pengembangan desa wisata di Desa Semen mengacu pada rancangan yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat. Rencana pengembangan desa wisata di Desa Semen telah terealisasi dan terdokumentasi dalam bentuk *master plan*. Pengembangan desa wisata didukung oleh beberapa unsur meliputi objek dan daya tarik, sarana dan prasarana, serta masyarakat (Wahyuni, 2018). Pembangunan fisik menjadi program pengembangan desa wisata di Desa Semen meliputi pelaksanaan pembersihan area wisata, pembangunan paseban, penambahan wahana bermain untuk anak-anak, membuat pagar keliling, papan informasi, taman agro edukasi, tulisan ikon wisata, tempat parkir, gapura pintu masuk, perbaikan jalan, toilet, gazebo, penyediaan wifi gratis, serta warung. Pembangunan secara fisik yang direncanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sebagai sarana pelengkap destinasi wisata dan daya tarik wisatawan.

Pembangunan non fisik juga menjadi program pengembangan desa wisata di Desa Semen yang meliputi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata, memasukkan objek wisata ke dalam Badan Usaha Milik Desa, serta melakukan promosi destinasi wisata melalui media sosial. Pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan adanya kebijakan Sapta Pesona Pariwisata oleh pemerintah meliputi promosi, aksesibilitas, dan sumber daya manusia (Wahyuni, 2018). Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Semen dapat dilihat dari keterlibatan warga dalam setiap kegiatan. Peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan (Ruru, Lengkon, & Ruru, 2020). Masyarakat Desa Semen selalu dilibatkan dalam program pengembangan desa wisata.

Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Pemerintah desa dan masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam pengembangan desa wisata. Peran dari masyarakat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata (Wahyuni, 2018). Kinerja pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata dapat diukur dari hasil, manfaat dan dampak yang diberikan kepada masyarakat (Mukmin, Ruslan, & Kurniati, 2018). Pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki membutuhkan partisipasi warganya melalui pemberdayaan masyarakat (Sidiq & Resnawaty 2018). Sinergi peran pemerintah desa dan masyarakat jika dilaksanakan dengan baik maka tujuan pengembangan desa wisata dapat terwujud sesuai harapan.

Pemerintah Desa Semen memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pokdarwis untuk memanfaatkan lahan kosong baik milik desa ataupun milik warga dalam menunjang pengembangan desa wisata. Masyarakat memanfaatkan lahan kosong dengan membangun penginapan dan toko untuk menghasilkan pemasukan. Pasal 77 ayat (2) UU Desa menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa. Pasal 26 ayat (2) huruf c UU Desa menjelaskan bahwa

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang sebagai pemegang kekuasaan keuangan dan aset desa. Pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata mempunyai wewenang untuk memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan aset yang ada.

Pemerintah Desa Semen mengadakan musyawarah dengan melibatkan perwakilan masyarakat untuk membahas ide pengembangan desa wisata. Penyusunan rencana pengembangan desa wisata harus dilakukan melalui musyawarah desa (Sukriono, 2021). Pemerintah desa dan masyarakat harus berkontribusi dalam membuat sebuah inovasi desa wisata agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Pasal 26 ayat (1) UU Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Semen telah menindaklanjuti ide pengembangan wisata dengan menggerakkan pokdarwis serta masyarakat untuk membantu merealisasikan inovasi yang dibuat.

Pengembangan desa wisata dapat dikategorikan sebagai pembangunan desa. Pasal 78 UU Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemanfaatan suatu daerah menjadi wisata memiliki potensi yang dapat memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat

Pengelolaan desa wisata dimasukkan dalam Badan Usaha Milik Desa melalui peraturan desa. Pengembangan desa wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dapat lebih terencana dan pembangunannya dapat diambilkan dari dana desa. Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk

mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah pengelolaan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata bersepakat untuk tidak menerima investor dari luar daerah. Pemerintah desa mengajak masyarakat desa untuk menjadi investor dengan cara menanamkan modal untuk pengembangan wisata. Pasal 78 ayat (1) UU Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan tanah kas desa untuk diberdayakan dengan maksimal. Kebijakan pemerintah desa terkait penolakan investor dari luar daerah diharapkan dapat menarik antusias masyarakat desa untuk membangun wisata sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama-sama.

Keberhasilan pengembangan desa wisata diukur dari pola pemberdayaan masyarakat. Proses pengembangan desa wisata harus melibatkan *policy creator* yaitu pemerintah sebagai pengambil keputusan, koordinator pengembangan wisata, fasilitator pengelolaan wisata, pelaksana kebijakan, dan akselerator program pengembangan wisata (Fahira, Umar, & Habibi, 2022). Hal ini telah dilakukan dalam pengembangan desa wisata di Desa Semen. Pengembangan objek wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa Semen melalui eksplorasi potensi yang dimiliki, sedangkan masyarakat berperan sebagai koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Pemerintah Desa Semen memberikan dukungan mulai dari kebijakan, pendanaan yang dianggarkan dalam APBDesa, serta melakukan *branding* wisata melalui *website* dan media sosial. Pengembangan desa wisata di Desa Semen berjalan dengan optimal karena didukung pemerintah desa dan masyarakat.

Pengembangan desa wisata harus melibatkan kolaborasi antara *stakeholder* yang memiliki kepentingan agar pelaksanaannya tidak menghadapi tantangan atau gagal. Permasalahan dalam pengembangan desa wisata terjadi karena tidak ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Saputra, 2020). Permasalahan dalam pengembangan desa wisata juga bersumber pada inisiasi salah satu pihak atau

penunjukkan dari pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Kegagalan pengembangan desa wisata dikarenakan masyarakat tidak mampu untuk menangkap inovasi yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata alam merupakan bagian integral pemberdayaan kapasitas institusional. Pemerintah Desa Semen memberikan fasilitas kepada wisatawan untuk merasakan kehidupan desa dengan menginap di *homestay* dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari warga. Pengembangan desa wisata membutuhkan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Sidiq & Resnawaty, 2017). Wisatawan selain diajak menginap dan merasakan kehidupan desa juga diberikan beberapa edukasi seperti cara mengolah tebu menjadi gula, memanen madu, memanen buah dan sayur-sayuran, dan memasak gula jawa. Tawaran untuk mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Semen membuat wisatawan khususnya dari perkotaan sangat senang.

Desa Semen menyediakan berbagai fasilitas yang menarik dan lengkap untuk wisatawan meliputi *outbound* yang dapat digunakan untuk beberapa kegiatan seperti *flying fox*, *game*, *hiking track*, susur sungai dan kegiatan lain. Upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas membuat wisatawan merasakan perbedaan dengan wisata-wisata di daerah lain (Hidayat & Djadjuli, 2020). Fasilitas *outbound* dan edukasi yang dimiliki Desa Semen menjadi alternatif pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan *gathering* yang dilakukan oleh staf kantor, sekolah, serta masyarakat secara umum. Desa Semen mendapatkan juara tiga nasional BCA Desa Wisata Awards pada Tahun 2021 dengan kategori desa wisata kreatif serta penghargaan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Sholeh, 2021). Keberhasilan Desa Semen menjadi desa wisata terbaik nasional tentu karena adanya kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat.

Pengembangan desa wisata di Desa Semen telah menerapkan *triple helix* yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. *Triple helix* harus dilakukan secara formal agar pengembangan desa wisata dapat berjalan optimal dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pola *triple helix* memberikan peran dari masing-masing pihak

yaitu pemerintah sebagai pemangku kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana pengelolaan wisata, serta perguruan tinggi menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Untari, 2019). Perguruan tinggi sebagai pihak eksternal memiliki peran mendampingi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Proses pengembangan desa wisata di Desa Semen dapat menjadi *role model* bagi daerah lain. Pola koordinasi antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat secara umum bertujuan agar pengembangan wisata dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga (Adif, 2014). Masyarakat Desa Semen secara umum diajak pemerintah desa untuk ikut berperan dalam proses kegiatan wisata. Masyarakat yang pasif diajak berpartisipasi dengan menyewakan rumahnya untuk dijadikan *homestay* atau lahan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan wisata desa. Potensi alam yang dimiliki harus didukung dengan kreatifitas masyarakat agar desa wisata yang dikembangkan menarik wisatawan untuk datang.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan pariwisata pada suatu daerah baik secara lokal, regional, dan nasional sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian. Daerah yang mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat (Adif, 2014). Mayoritas masyarakat di Desa Semen berprofesi sebagai petani dan peternak. Komoditi yang dihasilkan dalam pertanian diantaranya padi, jagung, tebu, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Komoditi yang dihasilkan dalam perkebunan diantaranya pisang, durian, nanas, salak dan manggis, sedangkan peternakan yaitu sapi dan kambing. Masyarakat Desa Semen sebelum adanya desa wisata hanya mengandalkan penghasilan dari hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan di setiap harinya dengan terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata.

Masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Semen bergabung dalam pokdarwis dengan mendirikan petik buah, perah susu, cafe

milennial, *outbond*, perkemahan, toko, persewaan *guest house*, perkemahan, spot foto dan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata memberikan dampak positif bagi kesejahteraannya (Mahardika & Utama, 2020). Keberadaan desa wisata Puspa Jagad di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Masyarakat desa yang pada umumnya hanya mengharapkan pendapatan dari hasil panen dapat memperoleh penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dengan adanya pengembangan desa wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkaji ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak pengembangan desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan menjadi indikator yang sangat penting untuk menentukan setiap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Semen mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya pengembangan desa wisata. Pemerintah desa mengkoordinir masyarakat untuk mengomersilkan potensi yang ada baik di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Warga juga didorong untuk ikut terlibat dalam pengembangan desa wisata untuk menambah penghasilan, selain berprofesi sebagai petani karena pengembangan desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Ruru, Lengkon, & Ruru, 2020). Pengembangan desa wisata di Desa Semen terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemukiman mempunyai fungsi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemukiman di Desa Semen sebagian besar termasuk dalam kategori layak huni dengan kelengkapan penerangan, kamar mandi, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Pemukiman yang sehat dan nyaman mampu menunjang kondisi kesehatan setiap penghuninya (Sugiarti, Aliyah, & Yudana, 2016). Pemerintah desa dan pokdarwis mengkoordinasi masyarakat untuk menyediakan *homestay* agar dapat disewa oleh para pengunjung. Desa wisata Puspa Jagad di Desa Semen juga menyediakan paket *life in* kepada pengunjung sehingga dapat menikmati nuansa desa dengan cara tinggal di rumah warga minimal tiga hari dua malam. Pengembangan desa wisata meningkatkan

penghasilan masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak.

Tingkat pendidikan menjadi indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan proses yang sengaja dan dipikirkan secara matang untuk mencerdaskan peserta didik. Pendidikan yang bermutu menjadi hak setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar tanpa memandang status sosial, ekonomi, etnis, suku, agama, dan lokasi geografis. Pendidikan di Desa Semen mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima sampai tujuh tahun terakhir. Pemerintah Desa Semen mayoritas lulusan SMA dan beberapa warga desa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yaitu D3, S1 dan S2.

Keberhasilan dalam program pengembangan desa wisata dapat diukur dari kesehatan warga setempat. Masyarakat yang sakit akan mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada diskriminatif dalam pelaksanaannya (Dewi, 2013). Peningkatan pengembangan desa wisata di Desa Semen dapat dilihat dari kemampuan warga dalam menjalani pengobatan dan membayar secara penuh obat yang dibutuhkan. Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar mempunyai fasilitas kesehatan yang cukup lengkap. Kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak terjadi diskriminasi. Keberadaan desa wisata membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat karena kondisi sungai dan lingkungan yang bersih terhindar dari sampah.

Keberadaan desa wisata membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pengembangan desa wisata dapat memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraan merupakan kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan

pokok baik makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang menunjang kualitas hidupnya. Kesejahteraan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, serta ketakutan atau kekhawatiran agar hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin (Adif, 2014). Pengembangan desa wisata di Desa Semen mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

SIMPULAN

Keberadaan desa wisata sangat menarik karena berasal dari inisiatif masyarakat. Program pengembangan desa wisata meliputi pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas wisata, sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat. Sinergi peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan desa wisata. Pengembangan objek wisata dilakukan oleh pemerintah desa melalui eksplorasi potensi yang dimiliki, sedangkan masyarakat berperan sebagai koordinator, fasilitator, implementator, dan akselerator. Pengembangan desa wisata berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari pendapatan, pemukiman yang bersih, tingkat pendidikan, serta terpenuhinya fasilitas kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, F. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Admaja, T, K., Oktiva, A., & Suwarjo. (2020) Desa Wisata Pentingsari: Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 2(2), 33-46.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117-226.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengembangan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291-303.
- Frasawi, E. S., & Citra, I. P. A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3), 175-185.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(2), 117-124.
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277-293.
- Mahardika, K. A., & Utama, M. S. (2020). Pengaruh Pemberdayaan dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wisata Pakseali, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(10), 2331-2359.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45-56.
- Mukmin, Z., Ruslan, & Kurniati, S. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 106-111.
- Putra, D. P. B. P. (2020) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Carangsari. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 1-15.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 30-36.
- Saputra, D. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 85-97.
- Sholeh, M. (16 September 2021). Bupati Blitar Apresiasi Desa Wisata Semen Raih Juara III Desa Wisata Awards 2021. *Times Indonesia*, hlm. 3.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi. *Cakra Wisata*, 17(2), 14-26.
- Sukriono, D. (2021). Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 92-100.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 365-380.
- Untari, S. (2019). Kolaborasi Perguruan Tinggi-Pemerintah Desa-Swasta dalam Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Pemuda dan Wanita dalam Membangun Desa Wisata Kebangsaan. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 2(2), 75-81.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 9(1), 85-102.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 323-334.